

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang kecil tetapi mempunyai imbas yang besar pada perekonomian suatu wilayah dan kemampuannya dapat menyerap energi kerja. Dengan hal ini maka, UMKM bisa digunakan sebagai tumpuan untuk menaikkan perekonomian suatu wilayah. Dikarenakan UMKM bisa bertahan dibandingkan menggunakan bisnis besar lainnya yang cenderung mengalami kemunduran dalam berbisnis.

UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik lantaran UMKM belum mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak harus menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum bagi pengguna eksternal. Namun semakin berkembangnya aktivitas maka UMKM mengalami ekspansi dan peningkatan yang melibatkan pihak eksternal.

Semakin berkembangnya suatu usaha, mengharuskan UMKM berhubungan langsung dengan bagian eksternal perusahaan. Misalnya dalam meningkatkan pendanaan UMKM berkaitan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lain. Pihak bank atau lembaga keuangan biasanya akan melampirkan laporan keuangan dalam menilai kelayakan kredit UMKM. Begitu juga, saat UMKM ikut serta dalam lelang pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pihak terkait. Pihak terkait akan membutuhkan laporan keuangan sebagai sebuah syarat kelengkapan administrasi.

Semakin berkembangnya suatu usaha, UMKM dituntut menyediakan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai standar yang diberlakukan. Laporan

keuangan disusun dengan asas akuntansi yang berlaku umum, yang mampu diterapkan oleh UMKM. Penerapan dalam menyusun Laporan Keuangan terdiri dari berbagai prosedur- prosedur yang berisi tentang berbagai cara yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Semakin banyak suatu kegiatan operasional perusahaan menjadikan laporan keuangan penting untuk diterapkan. Hasil dari pembuatan laporan keuangan bisa digunakan untuk memperlihatkan kondisi keuangan usaha tersebut.

Namun pada realitanya UMKM masih banyak mengalami masalah dan kendala yang berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan seperti menjalankan kegiatan keseharian pelaku UMKM harus melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap setiap transaksi yang terjadi dalam periode tertentu, yang mana setiap pencatatan tersebut bisa menghasilkan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu masalah mendasar dalam perkembangan UMKM. Banyak UMKM menganggap pengelolaan keuangan itu sederhana dan mudah. Padahal, pengelolaan keuangan UMKM menuntut pengusaha UMKM memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Beberapa kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan adalah karena kurangnya pemahaman akuntansi dan standar akuntansi keuangan dan rendahnya tingkat pendidikan UMKM, serta kurangnya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan. UMKM keberatan dengan SAK yang sama dengan perusahaan besar saat menyusun laporan keuangannya. Perusahaan besar lebih merasakan manfaat penyusunan laporan keuangan, sedangkan UMKM harus membayar lebih untuk merasakan manfaat penyusunan laporan keuangan pada pendapat (Singh,

2016). Dimana pelaporan keuangan memegang peranan penting dalam melakukan bisnis atau berbisnis, para pengusaha dengan laporan keuangan akan dengan mudah melihat bagaimana perkembangannya, sehingga memudahkan para pengusaha untuk mengambil tindakan yang harus mereka lakukan dengan melihat laporan akhir mereka. Tidak hanya itu, mereka akan mudah untuk mengambil pinjaman karena memiliki laporan keuangan yang jelas.

Laporan keuangan tidak berarti hanya dapat dibuat dengan mencatat transaksi keluar masuk. Sistem akuntansi UMKM cenderung sederhana, mengabaikan aturan standar pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan membantu upaya pengembangan usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui perkembangan bisnis perusahaan, posisi keuangan, struktur modal, dan keuntungan perusahaan. Menyikapi hal tersebut, pada 1 Januari 2018, SAK EMKM dapat secara efektif mendorong dan mendorong kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kerangka pelaporan UMKM diharapkan dapat membantu entitas dalam transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke pelaporan keuangan berbasis akrual. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan "Lembaga Keuangan Mikro yang mewajibkan Lembaga Keuangan Mikro untuk menyelenggarakan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku". (Singh, 2016). Dengan begitu, usaha mikro, kecil dan menengah mampu untuk melihat seberapa baik keuangan yang

dimilikinya, apakah usahanya mengalami keuntungan atau malah rugi dan bahkan terkendala hutang yang besar. Dari hal tersebut, pengusaha dapat mengambil keputusan yang tepat dalam usahanya. Seperti haruskah melakukan penagihan piutang atau mencari kreditur untuk menutup kerugiannya. Cukup banyak manfaat dari pembuatan laporan keuangan dalam sebuah usaha dan dengan adanya laporan keuangan usaha akan lebih berkembang.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zager & Decman (2016) di Kroasia belum mampu menerapkan model keuangan yang dikhususkan untuk entitas mikro kecil dan menengah dan hal tersebut karena di Kroasia belum ada ruang untuk menyederhanakan peraturan yang berlaku untuk pelaporan. Dari hasil penelitian Fajriani & Pramukti (2014) pada UMKM Toko Mahkota Sutera di Kampung BNI Kota Sengkang mengenai SAK EMKM masih rendah serta pencatatan dan penyusunan laporan tidak sesuai SAK EMKM dan permasalahan tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, oleh (Mutiah, 2019) dari hasil penelitiannya pada UMKM Silky Parijatah masih sangat sederhana, hanya mencatat pembelian dan penjualan belum sesuai dengan SAK EMKM dan permasalahan tersebut karena kurangnya pemahaman oleh pemilik. Hasil penelitian selanjutnya oleh (Hanifia & Utomo, 2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan UMKM Dapur Diana belum sesuai dengan SAK EMKM karena tidak menampilkan laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan yang menjadi permasalahannya adalah pemilik terlalu berfokus pada produksi dan penjualan produk serta belum ada sosialisasi mengenai SAK EMKM. Hasil penelitian selanjutnya ada dari (Dewi

& Silvia, 2022) UD Palwa belum menerapkan SAK EMKM, hanya mencatat pemasukan kas dan pengeluaran kas dan yang menjadi kendala UD Palwa adalah kurangnya pemahaman terkait SAK EMKM dan kurangnya sosialisasi mengenai SAK EMKM.

Sebagian besar pelaku usaha kecil dengan prospek usaha namun kondisi keuangan yang buruk. Apalagi di masa pandemi, banyak usaha kecil, menengah dan mikro yang tutup karena berbagai alasan, yang kemungkinan disebabkan oleh pengusaha tanpa laporan keuangan. Namun saat ini, UMKM memberikan dampak positif untuk Indonesia dalam data Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan jumlah sektor UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai Rp. 8,6 triliun. Salah satunya adalah daerah Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 264.198,37 KM² yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 KM² dan luas lautan 262.197,07 KM² dengan ibu Kota Kabupaten Natuna adalah Ranai. Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, yang berpenghuni 30 pulau (19,48%) dan yang tidak berpenghuni 124 pulau (80,52%). Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Bunguran dan Pulau Serasan.

Kabupaten Natuna terkenal akan kekayaan lautnya. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam Putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016. KKP mencatat laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting,

rajungan, hingga cumi-cumi. Sehingga hampir masyarakat yang tinggal di daerah pesisir membuat usaha perorangan atau kelompok usaha yang menggunakan hasil laut sebagai bahan bakunya. Salah satunya adalah usaha *Safa Home Industry*.

Usaha *Safa Home Industry* ini didirikan pada Mei 2019, yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Yang merupakan usaha perorangan. Usaha ini memanfaatkan rajungan yang dikupas atau menjual daging rajungan yang sudah dimasak. Adapun daging yang diambil hampir semua daging yang ada pada rajungan, dari bagian kepala, jepit bahkan jari-jari kecil yang ada pada rajungan. Saat ini sudah menjadi pemasok untuk perusahaan yang ada di Batam. Tentu saja hal ini sangat bagus sekali bagi kelangsungan usaha. Oleh karena itu, diharapkan agar UMKM dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya. Hal ini agar ada bukti yang nyata untuk melihat bagaimana perkembangan pengeluaran dan penerimaan yang didapatkan.

Terbatasnya pengetahuan dalam manajemen usaha akan mengakibatkan kesulitan dalam mengelola usaha, tidak mampu melihat peluang-peluang yang ada dalam lingkungan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyusun rencana, khususnya rencana dalam keuangan. Kekurangan tersebut membuat tidak teraturnya sistem pembukuan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM SAFA HOME INDUSTRY DI KABUPATEN NATUNA”**.